Kiai Hamam Dja'far dan Pondok Pabelan

Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat

Penyunting
Ajip Rosidi

PUSTAKA JAYA
dan
PONDOK PABELAN

KIAI HAMAM DJA'FAR
DAN PONDOK PABELAN
Kesaksian Santri, Kerabat, dan Sahabat

Penyunting: Ajip Rosidi

Diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya, Bandung
bekerjasama dengan Pondok Pabelan, Mungkid, Magelang

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
All rights reserved

Disain sampul: Muhammad Roniyadi
Foto sampul oleh Wadjihun Widadi
Sumber foto: Keluarga
Pondok Pabelan
Habib Chirzin

Cetakan pertama: Agustus 2008
Cetakan kedua: Agustus 2015

ISBN 978-979-419-347-1

PENGANTAR

K. H. Hamam Dja'far (1938-1993) telah berbuat sesuatu. Secara konkrit kiai aseli dari Desa Pabelan, Kabupaten Magelang ini mendirikan dan memimpin Balai Pendidikan Pondok Pabelan selama 28 tahun (1965-1993). Dari, lewat, dan berpusat di pesantren inilah Kiai Hamam mengaktualisasikan diri juga berkomunikasi secara terbuka dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan dari beragam latar belakang untuk berpikir bersama, berbuat bersama, bahkan kemudian bekerja sama saling membangun dan saling menguatkan dalam wadah besar negara Republik Indonesia. Sekian orang tokoh dan penggerak organisasi pada masa kepemimpinannya itu terbukti hadir, bertukar pikiran ataupun dipertemukan bersama di Pabelan guna menggagas berbagai hal dan berbuat bersama-sama. Bagi Kiai tampak jelas bahwa Pondok Pabelan saat itu merupakan sebagian dari hal yang penting atau bahkan menjadi hal yang terpenting sehingga cukup tepatlah bila disebutkan Pabelan sebagai buah karya nyata beliau.

Namun Pabelan bagi Kiai Hamam bukanlah tujuan melainkan sekadar alat. Alat beliau untuk bisa berbuat dan beraktualisasi diri dalam bingkai dunia pesantren, umat Islam dan lebih luasnya dalam bingkai kehidupan berbangsa-bermasyarakat di negara kita

K. H. HAMAM DJA'FAR DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

Zainal Arifin Ahmad

Pendahuluan

Tak dapat disangkal bahwa maju mundurnya bangsa lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia daripada sumber daya alam. Banyak bukti menunjukkan bahwa negara dengan sumber daya alam melimpah tetapi kualitas sumber daya manusianya rendah, pada akhirnya kalah bersaing dengan negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas. Jepang dan Singapura merupakan bukti hal tersebut. Oleh karena itu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mendapat perhatian utama. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan yang berkualitas.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas diperlukan penanganan sistimatis dan melibatkan semua pihak, tidak hanya sekolah atau pemerintah, tetapi juga masyarakat. Bahkan pengelolaan pendidikan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat semakin menjadi tuntutan dunia pendidikan.

Paradigma pendidikan berbasis masyarakat pada awalnya diperkenalkan oleh Comton dan Mc Clusky. Menurut Comton dan Mc Clusky, pendidikan berbasis masyarakat, yang mereka sebut *Community Education for Development,* berarti proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi mengerahkan sumber daya yang tersedia, dan melaksanakan rencana kegiatan atau pembelajaran, atau keduanya (Zubaidi, 2007). Sedangkan Michael W. Galbraith mendefinisikan pendidikan berbasis masyarakat (*community-basic education*) sebagai proses pendidikan di mana individu-individu (dalam hal ini orang dewasa) menjadi lebih berkompeten dalam keterampilan, sikap, dan konsep dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal masyarakat melalui keterlibatan secara demokratis (Galbraith, 1995)

Dalam Undang-undang No. 20/2003 pasal 1 ayat 16, pendidikan berbasis masyarakat didefinisikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki tujuan utama untuk melayani kekhasan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara mandiri. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap komponen masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memecahkan problem sosial dengan memobilisasi aksi bersama.

Masyarakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada tiga pilar utama yaitu "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat". Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat merupakan pelaku atau subyek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekadar obyek pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program

yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka (Zubaidi, 2007).

Dari tiga pilar utama penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, Galbraith memberikan uraian secara lebih luas tentang prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut.

Pertama, self determination (menentukan sendiri). Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumber daya masyarakat yang dapat dipergunaan untuk mencukupi kebutuhan.

Kedua, self help (menolong diri sendiri). Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik daripada menggantungkan diri, karena beranggapan bahwa kesejahteraan adalah tanggungjawab mereka sendiri.

Ketiga, leadership development (pengembangan kepemimpinan). Pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan, dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.

Keempat, localization (lokalitas). Potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program, dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan di tempatnya hidup.

Kelima, integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan). Setiap lembaga yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Keenam, reduce duplication of service (mengurangi duplikasi pelayanan). Masyarakat perlu mengkoordinasikan secara menyeluruh segala bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia

untuk menghindari duplikasi pelayanan.

Ketujuh, accept diversity (menerima keanekaragaman). Menghindari pemisahan atau pengasingan orang-orang disebabkan oleh perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Perwakilan warga masyarakat seluas mungkin terlibat dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan lainnya.

Kedelapan, institutional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah kewajiban lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat).

Kesembilan, lifelong learning (pembelajaran seumur hidup). Peluang untuk belajar secara informal dan formal harus tersedia untuk setiap anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang (Galbraith, 1995).

Inti sari pendidikan berbasis masyarakat adalah proses kesadaran hubungan sosial yang diarahkan untuk pengembangan masyarakat dengan memperhatikan kondisi pendidikan, sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Pendidikan berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan tidak jauh dari realitas yang dialami oleh masyarakat, sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di dalam masyarakat, mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan yang diinginkan.

Pesantren merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat. Kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik (Zubaidi, 2007). Jika ditilik dari sejarah kelahirannya, pesantren

merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dari bawah atau lahir berkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga yang tumbuh dari bawah, pesantren umumnya dikenal sebagai perguruan swasta yang berkemampuan tinggi dalam berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, kiai merupakan elemen paling esensial dalam pesantren. Ia seringkali menjadi pendirinya. Oleh karena itu, wajar apabila pertumbuhan pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kiai (Zamakhsyari Dhofier, 1982). Apabila memiliki kiai yang punya kemampuan memadai dalam memimpin dan mengelola, maka pesantren itu akan dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya, jika pesantren tidak memiliki kiai yang "mumpuni", maka kondisi pesantren itu akan cenderung menurun.

Salah satu kiai pesantren yang dikenal sangat berhasil dalam membangun dan mengembangkan pesantrennya adalah almarhum K. H. Hamam Dja'far, pendiri Pondok Pabelan, Magelang. Melalui Kiai Hamam, Pesantren Pabelan dikenal masyarakat luas sebagai pesantren yang moderen. Keberhasilan Kiai Hamam dalam mengembangkan pesantrennya tidak lepas dari kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan berbasis masyarakat yang saat ini semakin menjadi tuntutan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sangat menarik apabila dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Kiai Hamam dalam mengembangkan pesantrennya, khususnya ditinjau dari perspektif manajemen pendidikan berbasis masyarakat.

Sekilas Mengenai Kiai Hamam Dja'far

K. H. Hamam Dja'far dilahirkan di Desa Pabelan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, tanggal 26 Februari 1938 dari pasangan Kiai Dja'far dan Nyai Haji Hadijah. Kedua orangtuanya berasal dari Desa Pabelan. Jika ditelusuri lebih jauh, ayah Kiai Hamam keturunan Sunan Giri. Hal ini dapat dilihat dari silsilahnya, yaitu

Sunan Giri-Kiai Sobo (Juru Mertani)-Kiai Abdul Ghoni-Kiai Kerto Taruno-Kiai Muhammad Ali (Pendiri Pondok Pabelan tahun 1800). Kiai Muhammad Ali menurunkan Kiai Imam. Generasi Kiai Muhammad Ali II adalah Kiai Hasbullah yang kemudian menurunkan Kiai Dja'far, ayah K. H. Hamam Dja'far. Sedangkan isteri K. H. Hamam Dja'far adalah juga puteri kiai, yaitu K. H. Abdullah Umar dari Pondok Banaran yang jika ditarik ke atas bersambung ke Pangeran Diposono, keturunan Hamengku Buwono (HB) III. (Majalah *Minggu Pagi*, 10 Pebruari 1980).

Latar Belakang Pendidikan K. H. Hamam Dja'far meliputi Sekolah Rakyat (SR) tahun 1949 dan Sekolah Menengah Islam tahun 1952. Ketika berusia 13-14 tahun beliau melanjutkan studi ke Pesantren Tebuireng, Jombang, lalu ke Pondok Moderen Gontor Ponorogo, yakni tahun 1952 sampai dengan 1963.

Setamat dari Gontor, K. H. Hamam yang waktu itu berusia 25 tahun menghidupkan kembali Pondok Pabelan yang cukup lama mati suri karena para pengasuh dan santri-santrinya ikut terjun dalam peperangan melawan penjajah Belanda. Dengan menempati tanah seluas lima hektar, Pondok Pabelan resmi berdiri kembali tanggal 28 Agustus 1965. Pada kesempatan itu beliau mengatakan, "Kalau dalam 5 tahun gagal, saya akan menjadi pengarang, jika gagal juga jadi pengarang, saya akan menjadi orang kaya di Indonesia." Tekad K. H. Hamam untuk mengembangkan lembaga pendidikan pesantren akhirnya terbukti berhasil dan membawa nama harum, bukan saja buat Pondok Pabelan yang diasuhnya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

K. H. Hamam wafat pada 17 Maret 1993 karena sakit beberapa waktu lamanya dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang putera. Beliau dimakamkan di pemakaman masjid Pesantren Pabelan. Meski K. H. Hamam telah tiada, tetapi spirit perjuangan dan pengabdian hidupnya demi agama, negara dan bangsa senantiasa mengalir dan memancarkan inspirasi tiada henti

kepada generasi sesudahnya.

Sekilas Perjalanan Pesantren Pabelan

Saat K. H. Hamam membuka kembali Pesantren Pabelan tanggal 28 Agustus 1965, kondisi masyarakat Desa Pabelan secara umum memprihatinkan. Desa Pabelan dengan lingkungan kehidupan pedesaan, warganya hidup dari pertanian dengan kondisi sawah yang semakin menyempit dan tidak mencukupi untuk kebutuhan penduduk. Luas areal desa sekitar 321.736 hektar, terdiri dari 237.250 hektar tanah sawah, 69.736 hektar tanah pekarangan, 12 hektar tanah kebun. Dari sawah seluas 237.250 hektar itu, kira-kira 9 hektar diairi dengan sistim irigasi teknis, sedangkan yang 116 hektar diairi oleh irigasi yang amat sederhana, selebihnya 112.250 hektar merupakan sawah tadah hujan. Secara umum kondisi masyarakat Pabelan tergolong miskin. Banyak anak mudanya tidak memiliki pekerjaan tetap alias menganggur.

Kondisi pesantren sendiri juga serba kekurangan. Saat itu Pesantren Pabelan hanya mempunyai tiga buah rumah bambu sebagai kediaman keluarga kiai, sebuah masjid dan sebidang tanah seluas setengah hektar (Faruk Afkar, 1981: 31). Sampai sekitar tahun 1970, secara umum, kondisi Pesantren Pabelan masih terlihat amat sederhana. Sarana pembelajaran yang dimiliki amat terbatas. Bangunan untuk ruang-ruang kelas nyaris tidak ada yang permanen, tetapi hanya terbuat dari bambu dan kayu serta beratap rumbia. Bahkan sebagian ruang kelas terpaksa menggunakan serambi rumah milik masyarakat sekitar Pabelan yang juga sangat sederhana. Demikian pula kondisi pondok atau asrama tempat tinggal para santri yang dindingnya hanya terbuat dari papan-papan kayu dengan lantai tanah, tanpa semen apalagi keramik. Media pembelajaran utama hanyalah papan tulis hitam dan kapur putih sebagai alat tulis.

Meskipun lokasi Pesantren Pabelan tidak terlalu jauh dari jalan raya utama Yogyakarta–Magelang, tetapi suasana pesantren

sampai tahun 1974 tampak seperti terisolir dari keramaian kota. Jalan menuju komplek pesantren yang jaraknya sekitar satu kilometer dari jalan raya belum beraspal, tetapi hanya dari tanah dan bebatuan yang tidak nyaman untuk dilalui kendaraan.

Namun demikian, kondisi pesantren yang semula serba memprihatinkan itu, setahap demi setahap mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Jalan menuju ke Pesantren Pabelan yang semula hanya dari tanah dan batu kerikil, pada tahun 1975 sudah beraspal halus sehingga dapat dilalui kendaraan dengan lancar dan nyaman. Pembangunan jalan itu merupakan hasil swadaya masyarakat dengan pesantren dan bantuan Pemda Dati II Magelang. Sementara itu bangunan-bangunan permanen untuk ruang kelas, asrama, gedung perpustakaan, dan lain-lain, satu demi satu didirikan sehingga menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran. Jumlah santri yang pada awalnya (1965) hanya 35 orang, terdiri dari 19 santri putera dan 16 santri puteri, dan itu pun sebagian besar berasal dari kalangan orang tidak mampu sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah setamat SD atau murid putus sekolah, namun pada 1975 jumlah santrinya telah ribuan. Tahun-tahun berikutnya jumlah santri terus bertambah. Mereka datang dari berbagai pelosok tanah air dan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk putera-puteri para tokoh dari berbagai daerah serta dari kalangan orang mampu secara ekonomi dan sosial.

Nama Kiai Hamam bersama pesantren yang diasuhnya semakin hari semakin dikenal masyarakat luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hampir tiap hari, para tamu, baik secara individu maupun rombongan dari berbagai daerah dan kalangan berkunjung ke Pesantren Pabelan dalam rangka studi banding maupun sekadar silaturahim dan berdisksusi dengan Kiai Hamam. Kesuksesan Pesantren Pabelan itu jelas bukan sesuatu yang *given,* tetapi hasil rancang bangun pemikiran yang progresif dan perjuangan yang tak kenal lelah.

Langkah-langkah Kiai Hamam Membangun dan Mengembangkan Pesantren

Dalam teori kepemimpinan, dikenal teori perilaku yang menjelaskan mengapa seorang pemimpin berhasil dalam kepemimpinannya. Menurut teori perilaku, pemimpin itu sukses tergantung pada apa yang dilakukan, yakni bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dengan dan memotivasi bawahan, menjalankan berbagai tugas, dan sebagainya. Perilaku-perilaku ini dapat dipelajari atau dikembangkan. Sehingga individu-individu dapat dilatih dengan perilaku-perilaku kepemimpinan yang tepat (Hani Handoko, 1990).

Dalam konteks Pesantren Pabelan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Kiai Hamam berperilaku atau melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan pesantrennya? Dalam perspektif manajemen pendidikan berbasis masyarakat, pertanyaan yang lebih terinci adalah apa dan bagaimana Kiai Hamam mengelola sumber daya masyarakat yang ada untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya?

Berdasarkan data-data yang dapat penulis himpun, di sini dapat dikemukakan berbagai langkah strategis yang dilakukan Kiai Hamam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mengembangkan pesantrennya. Langkah-langkat itu adalah sebagai berikut.

1. Berkomunikasi Intensif dengan Masyarakat Sekitar

Setelah memiliki tekad bulat untuk membangun kembali Pesantren Pabelan, langkah awal yang dilakukan Kiai Hamam adalah berkomunikasi intensif dengan masyarakat sekitar. Beliau mendatangi (*sowan*) para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuda dari berbagai golongan atau kelompok. Mereka diajak berdialog memikirkan bersama nasib desa dan masyarakatnya yang sedang mengalami kemunduran. Beliau dengan antusias bertukar pikiran, berusaha mengembangkan gagasan-gagasan konkrit,

obyektif, jujur terhadap materi, kedudukan ataupun status sosial. Proses pendekatan ini dijalankan dengan penuh semangat tanpa kenal waktu. Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi komunikasi itu, K. H. Hamam memanfaatkan berbagai pertemuan yang ada, baik di masjid, mushola, di tempat orang punya hajatan, di pinggir sawah, kolam, dan bahkan tidak segan-segan ikut *nimbrung* dalam obrolan para pemuda yang sedang berkumpul. Melalui cara itulah, gagasan-gagasan besar yang dimiliki Kiai Hamam dapat diterima dan menjadi milik atau kebutuhan masyarakat juga.

2. Membangun Institusi dan Wadah Komunikasi dengan Masyarakat Lokal

Setelah gagasan-gagasan, cita-cita, dan tekad untuk membangun masyarakat dan pesantren diyakini telah diterima dan didukung masyarakat, Kiai Hamam mengajak masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga atau forum-forum yang berfungsi untuk memperkokoh media komunikasi dan mendukung program-program yang akan dilakukannya bersama masyarakat. Upaya Kiai Hamam itu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Pada pertengahan 1965 terbentuklah wadah kegiatan masyarakat Pabelan yang bernama Pemeliharaan Tradisi Islam Pabelan (PTIP) dan Persatuan Pemuda Pabelan (P3). Dengan adanya forum komunikasi itu, rencana Kiai Hamam untuk mendirikan kembali Pondok Pabelan semakin mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Walhasil, pada hari Sabtu 28 Agustus 1965 tepatnya pukul 14.00 WIB dibukalah kembali lembaga pendidikan yang bernama Balai Pendidikan Pondok Pabelan yang sampai sekarang berdiri dan lebih dikenal dengan nama Pondok Pabelan. Dari sinilah tahapan baru Pondok Pabelan berdiri dan mulai menapaki program-program inovatifnya di dunia pendidikan yang mencoba mengintegrasikan kehidupan pondok dengan kehidupan masyarakat.

Untuk memperkuat langkah Kiai Hamam membangun

pesantren, maka dibentuklah Badan Wakaf Pondok Pabelan pada tanggal 31 Agustus 1965 pukul 20.00 WIB, dengan anggota para sesepuh dan tokoh masyarakat, serta Pamong Desa Pabelan. Langkah Kiai Hamam yang melibatkan pamong desa dalam memikirkan pendidikan merupakan langkah yang dapat dipandang cukup brilian. Sebab para pamong desa pada umumnya hanya mengurusi pemerintahan dan masalah sosial, tetapi di Pabelan mereka juga dilibatkan untuk memikirkan dunia pendidikan. Badan wakaf itu di samping sebagai forum musyawarah dan lembaga sosial desa, juga menjadi forum tertinggi untuk membahas dan mengembangkan Pondok Pabelan. Dengan terbentuknya berbagai institusi sosial yang digagas Kiai Hamam itu, proses integrasi pesantren dengan masyarakat benar-benar terwujud. Tekad Kiai Hamam untuk membangun pesantren dan masyarakatnya semakin mendapat jalan mulus. Peran kongkrit pesantren dalam membangun masyarakat dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana tetapi memiliki nilai strategis. Salah satu contohnya adalah pada masa awal berdiri, pesantren mengadakan kursus berbagai keterampilan bagi para pemuda Pabelan yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dan pengajian untuk masyarakat pada setiap hari Senin.

3. Membangun Sumber Dana Lokal

Pada masa awal, kondisi pesantren serba terbatas. Apalagi menyangkut dana. Oleh karena itu, Kiai Hamam mengajak para elit desa untuk mengembangkan pendidikan di pondok pesantren yang kondisi fasilitasnya kurang memadai tersebut dengan dua langkah, yaitu *pertama,* mengadakan *"jimpitan beras"* bagi tiap keluarga yang ingin menyumbang pondok. Dengan tabung bambu yang digantung di depan rumah masing-masing penduduk, tiap hari tabung tersebut diisi satu atau dua sendok beras untuk kemudian diambil oleh petugas dari santri setiap hari Kamis. Meskipun *jimpitan* hasilnya sedikit (sekitar 10 kilogram) karena memang penduduk masih tergolong miskin, namun yang penting adalah adanya

partisipasi masyarakat untuk ikut memajukan pondok, sehingga perasaan memiliki pesantren tetap ada. Hasil *jimpitan* diuangkan dan dibelikan peralatan pendidikan yang diperlukan.

Langkah *kedua* adalah menggarap sawah milik pamong desa dan orang-orang kaya di Desa Pabelan dengan sistim bagi hasil. Cara ini dikerjakan oleh santri di luar jam belajar. Dari hasil menggarap sawah inilah, kebutuhan sarana belajar sedikit demi sedikit teratasi.

Langkah *ketiga,* K. H. Hamam bersama santri dan penduduk memanfaatkan material yang ada di sungai dan sekitarnya, seperti batu, pasir, serta sumbangan bambu dan kayu dari penduduk, mendirikan bangunan sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu yang dipakai untuk aktivitas pendidikan dan pengajaran serta pengajian. Demikianlah hingga sekitar tahun 1970 segenap santri dibebaskan dari segala macam pembayaran uang pendidikan. Suasana saat itu benar-benar memperlihatkan pola hidup gotong-royong, mandiri, dan menghargai pekerjaan bersama.

4. Menghindari Perdebatan Masalah Khilafiyah

Langkah lain yang ditempuh Kiai Hamam adalah memilih issu sentral atau tema program yang lebih berorientasi pada usaha kongkrit perbaikan kehidupan masyarakat daripada pembicaraan tentang paham keagamaan yang bisa menimbulkan masalah khilafiyah seperti perbedaan paham tentang fiqih atau ideologi kepartaian. Pada waktu itu di Desa Pabelan ada dua partai yang dianut oleh masyarakat. Di bagian utara didominasi oleh warga bekas anggota Masyumi, termasuk keluarga Kiai Hamam Dja'far walaupun sudah tidak aktif lagi. Sedangkan di bagian selatan mayoritas warga NU. Namun demikian, berkat sikap bijaksana Kiai Hamam, semua kekuatan sosial politik di Desa Pabelan relatif dapat disatukan untuk membangun bersama pesantren dan masyarakat.

5. Memperluas Dukungan Politik Komunitas yang Beragam

Fakta yang tak terbantah adalah bahwa pondok pesantren secara umum dikuasai oleh komunitas NU, termasuk di daerah Magelang. Mendirikan pesantren di Magelang, Jawa Tengah tanpa pengakuan dari para kiai komunitas NU tentu akan mengalami hambatan cukup berarti. Menyadari akan hal tersebut K. H. Hamam mengadakan pendekatan dengan silaturahim dan meminta saran-saran serta doa restu dari jajaran kiai tingkat kecamatan sampai tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan pesantren.

Untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan para Kiai NU, Kiai Hamam ikut aktif dalam organisasi NU dan Gerakan Pemuda Anshor. Meskipun langkah itu oleh kalangan keluarga dan rekan-rekan dari Muhammadiyah dianggap "menyeberang", tetapi dengan kepandaian negosiasi dan diplomasi, beliau berhasil mengatasi masalah tersebut, sehingga Pesantren Pabelan mendapat pengakuan dan publikasi secara efektif.

Keberhasilan negosiasi Kiai Hamam Dja'far dibuktikan pula dengan penyelenggaraan Konferensi Ittihadul Ma'ahidil Islamiyah (IMI) atau Ikatan Pondok Magelang pada tahun 1977 bertempat di Pondok Pabelan atas inisiatifnya sendiri. Konferensi dihadiri oleh 40 orang kiai dan merupakan peristiwa pertama yang cukup mengagumkan bagi kalangan kiai di daerah Magelang.

Dari peristiwa itulah kiranya K. H. Hamam dapat mempelajari pola pemikiran para kiai dan para tokoh agama (dari kalangan NU khususnya) guna memajukan Pondok Pabelan. Sejak peristiwa itulah nama Pondok Pabelan mengorbit sampai pada tingkat Jawa Tengah. Adapun hubungan K. H. Hamam Dja'far dengan elit agama selain kalangan NU, dibangun melalui jaringan lain. Keluarga K. H. Hamam adalah mantan pengikut kuat Masyumi. Beliau sendiri alumni Pondok Moderen Gontor yang jaringan silaturahminya sangat kuat. Sehingga dalam waktu yang bersamaan para elit agama dari ketiga komunitas tersebut (NU, Muhammadiyah yang sebagian pengurusnya mantan Masyumi, dan alumni Pondok Gontor) merasa terlibat dan memberikan kontribusi terhadap Pondok Pabelan.

6. Membangun Jaringan Intelektual dengan Berbagai Kalangan

Dalam rangka memperkokoh eksistensi pesantren dan melakukan inovasi-inovasi sistim pendidikan pesantren, Kiai Hamam mengembangkan jaringan intelektual dengan berbagai macam pakar, seniman dan budayawan. Dalam konteks ini, Kiai Hamam mengatakan:

> "Kita serap berbagai faktor lingkungan secara total. Kita beri kemungkinan dan kesempatan mengembangkan daya pikiran berbagai pihak untuk pengembangan Islam. Sebab, pada dasarnya Islam menerima hal-hal yang bersifat moderen. Namun demikian, kita dalam hal ini sama sekali bukan membebek atau membeo. Pada saat-saat tertentu, kita undang budayawan dan cendekiawan serta ulama untuk mengadakan diskusi di sini. Ini adalah gambaran Islam seutuhnya, akan lebih bahaya apabila kita dijajah oleh diktator pikiran daripada oleh diktator birokrasi." (Majalah *Selecta*, Juni 1981 no. 30).

Apa yang dikatakan Kiai Hamam benar-benar dibuktikan dalam tindakan. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Hamam melakukan komunikasi dan dialog dengan berbagai kalangan intelektual. Tidak jarang diskusi yang beliau lakukan berlangsung selama semalam suntuk. Tercatat sejumlah tokoh penting hadir di Pabelan, seperti Rendra, Bagong Kassudiardjo, Arifin C. Noer, Romo Mangunwijaya, bahkan tokoh pendidikan Katolik Ivan Illich dari AS.

Melalui jaringan intelektual dengan berbagai kalangan, Pesantren Pabelan semakin memantapkan diri sebagai salah satu

model alternatif pendidikan di Indonesia yang diakui oleh berbagai kalangan. Karena pandangan-pandangan yang dilontarkan K. H. Hamam berhasil menerobos ragam budaya dan struktur masyarakat saat itu, serta sikap keterbukaan K. H. Hamam untuk mendengarkan dan menelaah berbagai macam gagasan dan masukan dari mana pun datangnya, sekalipun gagasan atau pun kritik itu datang dari orang non-muslim, maka beliau mampu mengakomodir dan membuat sintesa tetapi tetap dalam format dan iklim pesantren. Inilah salah satu hal yang membuat Pondok Pabelan menerima hadiah The Aga Khan Award for Architecture pada bulan Oktober 1980 dari Aga Khan Foundations yang berkantor di Swiss. Penilaian itu dilakukan oleh 9 juri yang terdiri dari arsitek dan nonarsitek, Islam dan non-Islam, yaitu: Titus Burckhardt, Mr. Sherbant Cantazuzino, Mr. Oiancarlo de Carlo, Dr. Mahbub Ul Haq, Mr. Muzarul Islam, Prof. Abdullah Kuran, Dr. Mona Serageldin, Dr. Sudjatmoko dan Mr. Kenzo Tange. Pemberian Aga Khan Award sebagai simbol pengakuan dari dunia Internasional kepada Pondok Pabelan sekaligus kepeloporan K. H. Hamam buat model pembangunan yang tepat bagi dunia berkembang. Yaitu model pembangunan yang berangkat dari lapisan bawah tetapi mampu membuat gerak antisipasi dan adaptasi terhadap dunia moderen tanpa merusak bangunan budaya sebelumnya.

Hadiah tersebut diberikan langsung kepada K. H. Hamam oleh H. Aga Khan bersama Presiden Pakistan Zia Ul Haq di Taman Shalemar, Lahore. Dan dua tahun berikutnya beliau menerima hadiah penghargaan lingkungan hidup nasional "Kalpataru" dari Presiden RI Soeharto di Istana Jakarta bertepatan dengan hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 1982.

Di samping melakukan jaringan intelektual dengan berbagai pihak secara perorangan, Kiai Hamam juga membangun jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (LSM). Pesantren Pabelan berulang kali dijadikan ajang berbagai pelatihan.Tahun 1970 diadakan latihan

pertukangan kayu dan batu selama delapan bulan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan PLKI Yogyakarta. Tahun 1976 diadakan latihan kerajinan bambu bekerja sama dengan LP3ES, SPIK Yogyakarta dan Pusat Kerajinan Bambu RIDAKA Pekalongan. Kemudian pada tahun 1978 diadakan Latihan Kader Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Pada tahun 1979 diadakan latihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bekerja sama dengan LP3ES dan Yayasan Mandiri serta ITB. Tahun 1980 diadakan latihan Teknologi Tepat Guna (TTG) bekerja sama dengan LP3ES, Yayasan Mandiri dan Yayasan Dian Desa Yogyakarta. Materi yang diberikan meliputi pembuatan tungku penghemat bahan bakar dan pembuatan tangki bambu semen oleh Dian Desa. Materi pembuatan kincir angin, Ferro cement, Fiber cement, pompa air, dan sanitasi diberikan oleh Yayasan Mandiri.

Selain latihan-latihan tersebut di Pondok Pabelan diadakan pula penataran dan pendidikan tingkat daerah maupun tingkat nasional. Seperti pada tahun 1975 diadakan Pendidikan dan Latihan Pesantren tingkat daerah dan nasional oleh Departemen Agama, pada tahun 1976 diadakan Pendidikan dan Latihan Guru-guru Madrasah Ibtidaiyah se-Jawa Tengah oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1977 diadakan Pendidikan dan Latihan Guru-guru Madrasah Ibtidaiyah se-Jawa Tengah dan DIY, serta pada tahun yang sama pula diadakan penataran Wartawan Bidang Agama tingkat Nasional yang bekerja sama dengan Departemen Agama dan PWI Pusat.

Penutup

Paparan di atas menunjukkan bahwa K. H. Hamam sebagai pemimpin lembaga pendidikan benar-benar mampu mengembangkan model manajemen pendidikan berbasis masyarakat. K. H. Hamam bukan hanya mempraktekkan, tetapi juga menunjukkan

performa yang sangat mengesankan dan diakui oleh masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Semua prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Galbraith secara cerdas telah dilakukan oleh K. H. Hamam. Prinsip-prinsip itu meliputi *self determination* (menentukan sendiri), *self help* (menolong diri sendiri), *leadership development* (pengembangan kepemimpinan), *localization* (lokalitas), *integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan), *reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan), *accept diversity* (menerima keanekaragaman), *institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan), dan *lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup).

DAFTAR PUSTAKA

Faruk Afkar, "Pesantren in Java: Local Institution and Rural Development", *The Canging Rural Habitat.* Vol. l, 1981.

Komarudin Hidayat, "Pesantren dan Elit Desa", dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren,* (Jakarta; P3M, 1985).

Majalah *Gadis*, no. 2, tahun 1980.

Majalah *Hai,* no. 3, tahun vi.

Majalah *Minggu Pagi,* 10 Februari 1980.

Majalah *Mutiara,* tanpa tahun.

Majalah *Panji Masyarakat* No. 307 ; 15 Nopember 1980, tahun XXII).

Majalah *Selecta,* Juni 1981 no. 30.

Majalah *Tempo* 1 November 1980.

Meizer SN, "Peranan Pesantren dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan dan Peningkatan Kepedulian Masyarakat", *Laporan Penelitian*, 1994.

Michael W. Galbraith, 1995. *Community–Based Organizations and The Delivery of Lifelong Learning Opportunities* : http.//www.ed.gov/pubs/PLLI Conf95/comm.html. (19 April 2006).

Noer Istiqomah, "Pondok Pesantren dalam Integrasi Sosial; Studi kasus di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta,1987.

Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah,* (Gramedia Pustaka Utama, 1992).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Fenelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992).

Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).